

2021 | DINAS TENAGA KERJA,
KOPERASI USAHA MIKRO

KABUPATEN NGANJUK



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

Jl. Dermojoyo Nomor 45 Nganjuk

Telp / Fax : 0358-325200

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.1.1 Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk juncto Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang merupakan pejabat eselon II, dibantu oleh sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing merupakan pejabat eselon III. Disamping itu ada pula 1 (satu) kepala sub bagian dan 10 (sepuluh) kepala seksi yang masing-masing merupakan pejabat eselon IV. Didalam organisasi Disnakerkop dan UM Kabupaten Nganjuk terdapat jabatan fungsional tertentu sebagai penunjang organisasi dan juga staf pelaksana umum

1.1.2 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

1.1.2.1 Organisasi

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Adapun struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro digambarkan sebagai berikut :

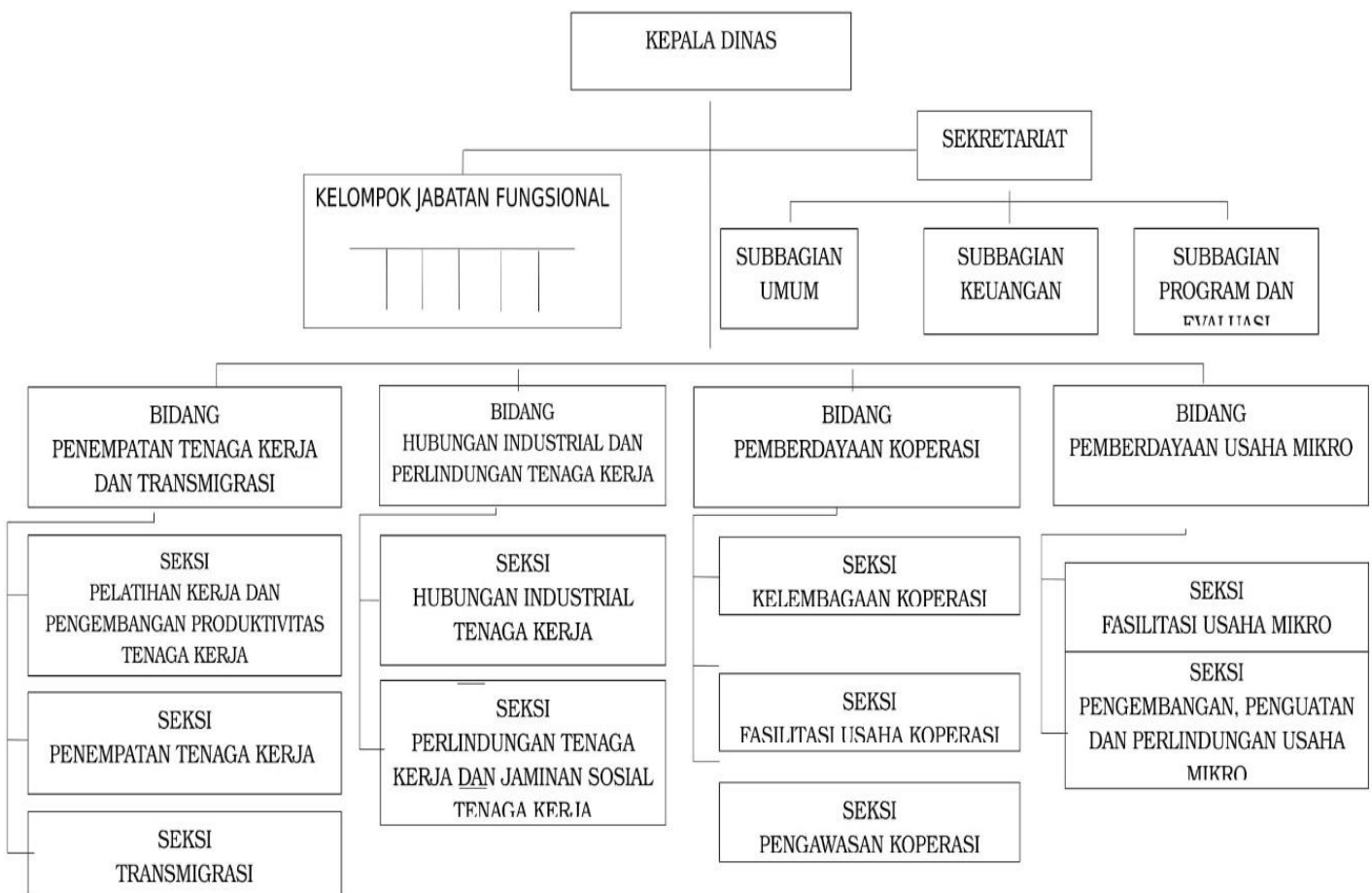
Kepala Dinas membawahi :

1. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Program dan Evaluasi
2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a) Seksi Pelatihan Kerja dan Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja
 - b) Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 - c) Seksi Transmigrasi
3. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a) Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja

- b) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 4. Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari :
 - a) Seksi Kelembagaan Koperasi
 - b) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
 - c) Seksi Pengawasan Koperasi
- 5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri dari :
 - a) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
 - b) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro

Susunan organisasi sebagaimana tersebut diatas digambarkan dalam bagan sebagaimana berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK



1.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

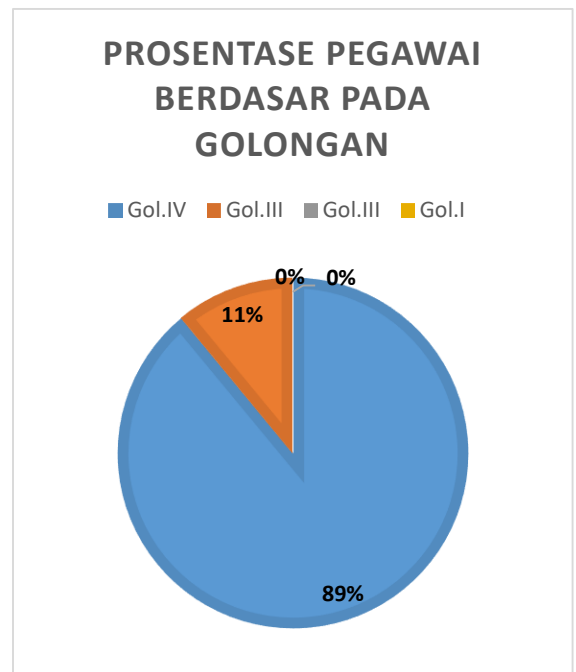
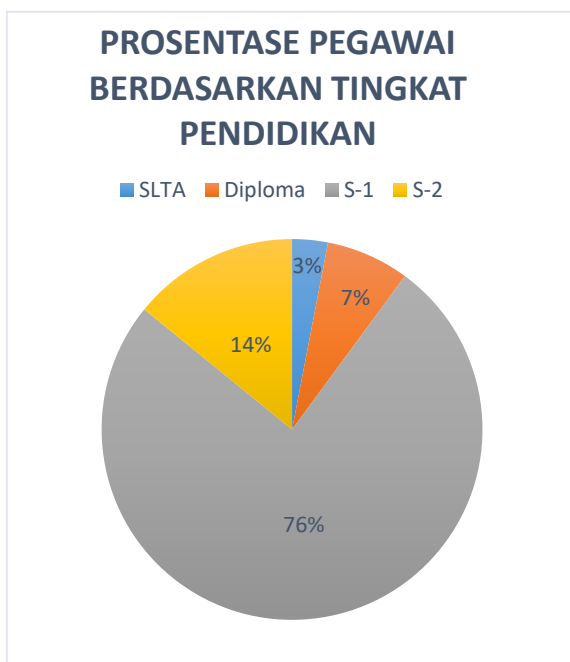
Tugas Pokok : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro

- Fungsi :
- perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro;
 - pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro;
 - pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 28 orang dengan persentase dan rincian sebagai berikut :

- a. Prosentase Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan Dan Golongan



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa persentase tingkat pendidikan pegawai terbesar ada pada jenjang S-1 sebesar 76% dan terkecil pada jenjang SLTA, sedangkan persentase pegawai berdasar golongan terbesar ada pada Golongan IV dan yang terkecil ada pada golongan III, dan tidak ada Gol. II dan I di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk.

b. Rincian Pegawai Berdasar Jabatan Struktural dan Jenjang Pendidikan

NO	NAMA	JABATAN	ESELON	PENDIDIKAN
1	Drs. Supiyanto, MM NIP. 19631015 198903 1 016	Kepala Dinas	II/b	S-2
Sekretariat				
2	Dra. Sri Laksmi Hardini NIP. 19660712 199202 2 002	Sekretaris	III/a	S-1
3	Ujjana Wahyuni, SS NIP. 19860709 201101 2 007	Kasubbag Umum	IV/a	S-1
4	Guntoro, S.Pd NIP. 19790331 201001 1 002	Kasubbag Keuangan	IV/a	S-1
5	Sri Utami, S.Sos NIP. 19730424 199503 2 003	Kasubbag Program dan Evaluasi	IV/a	S-1
6	Imam Kanafi, S.Sos NIP. 19680410 199203 1 014	Staf Pelaksana	-	S-1
7	Parwito NIP. 19631104 198603 1 013	Staf Pelaksana	-	SLTA
8	Rahayu Listyo Puryanti, A.md NIP. 19751227 201001 2 006	Staf Pelaksana	-	D-III
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
9	Marsini, SE NIP. 19641214 198603 2 011	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	III/b	S-1
10	Dra. Wiwik Winarti NIP. 19651209 199412 2 001	Kepala Seksi Produktifitas Tenaga Kerja	IV/a	S-1
11	Lilis Ratnawati, SH NIP. 19650501 199202 2 004	Kepala Seksi Transmigrasi	IV/a	S-1
12	Titik Purwani, S.Sos NIP. 19740215 199803 2 004	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja	IV/a	S-1
13	Nur Rahayu, SE NIP. 19780717 199803 2 005	Staf Pelaksana	-	S-1
14	Sean Fitria Rohmawati L, S.AP NIP. 19911109 202012 2 007	Staf Pelaksana	-	S-1
Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja				
15	Suwanto, SH, MH NIP. 19810106 200604 1 010	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	III/b	S-2
16	Sulistyorini, S.IP NIP. 19650620 198602 2 002	Kepala Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja	IV/a	S-1
17	Deky Nurmansyah, SH, MH NIP. 19831007 200903 1 004	Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Jamsostek	IV/a	S-2
18	Sapto Wijayani PG.DIP, Sc NIP. 19650310 198803 2 008	Staf Pelaksana	-	D-III
Bidang Pemberdayaan Koperasi				
19	Retno Prabandari, S.Pd, M.Si NIP. 19650508 198602 2 005	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	III/b	S-2
20	Edy Setiawan, S.IP NIP. 19870909 200701 1 001	Kepala Seksi Fasilitas Usaha Koperasi	IV/a	S-1
21	Bimo Budi Utomo, SE NIP. 19700721 198903 1 001	Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi	IV/a	S-1
		Kepala Seksi Pengawasan Koperasi	-	-
22	Iwan Kurniawan, SE NIP. 19781122 201101 1 005	Staf Pelaksana	-	S-1
23	Dwi Efendi, ST NIP. 19840529 201101 1 004	Staf Pelaksana	-	S-1
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro				

24	Drs. Susbagio NIP. 19631230 198504 1 006	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	III/b	S-1
25	Santi Punto Asih, SE NIP. 19720413 199203 2 004	Kepala Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	IV/a	S-1
26	Ganang Wahyudi C. SE NIP. 19780311 2010 01 1 016	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro	IV/a	S-1
27	Dadit Haryono, S.I.Kom NIP. 19790726 202012 1 004	Staf Pelaksana	-	S-1
28	Silvia Yuli Astuti, SE NIP. 19890726 202012 2 006	Staf Pelaksana	-	S-1

1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pembangunan Daerah tidak dapat terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana yang bersifat fisik sebagai pendukung kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tercukupinya penyediaan sarana dan prasarana pendukung akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi.

Gedung Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk terletak di Jalan Dermojoyo No. 45 Nganjuk dengan luasan 4.157 m². Selain Ruang Gedung Utama untuk kantor di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk terdapat pula Ruang Aula Pertemuan yang mampu menampung 100 (orang) peserta rapat, sehingga keberadaan sarana fisik berupa gedung perkantoran dirasa cukup memadai untuk pelaksanaan tugas sehari – hari.

Prasarana lain berupa penerangan listrik telah memiliki instalasi tersendiri sehingga penggunaan listrik sudah memadai, juga dengan prasarana komunikasi berupa telepon/faximili sudah terpasang dan berfungsi dengan baik. Sedangkan untuk prasarana jaringan internet kapasitas bandwithnya masih kecil bila dibandingkan dengan pengakses jaringan setiap harinya. Penambahan kapasitas dan titik jaringan internet yang cepat menjadi prioritas dalam penganggaran karena saat ini untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari – hari lebih mengandalkan Sistem Informasi Manajemen yang terkoneksi dengan internet.

Prasarana mesin ketik komputer/printer yang ada kurang memadai dengan kebutuhan yang diperlukan baik jumlah maupun keadaan komputer tersebut, sehingga diperlukan adanya tambahan dana pemeliharaan dan pengadaan baru secara bertahap. Hal serupa juga terjadi pada sarana meubelair yang memerlukan penambahan rak serta perbaikan.

Prasarana tanah yang ada sebanyak 1 bidang, alat angkutan sebanyak 22 unit, alat kantor dan rumah tangga sebanyak 311 unit, alat studio komunikasi dan pemancar sebanyak 8 unit, alat komputer sebanyak 86 unit, bangunan gedung sebanyak 12 unit, tugu titik kontrol/pasti sebanyak 3 buah serta instalasi jaringan listrik sebanyak 3 titik dengan nilai total aset sebesar Rp. 3.029.116.155.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

Tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dirumuskan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam RPJMD 2018-2023. Adapun yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah **“Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Notho Kutho)”**.

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk memiliki peranan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang melaksanakan misi keempat dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu : **“Meningkatkan Keberpihakan Pemerintah dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan berbasis Pertanian dan Potensi Lokal serta Sektor Produksi Lain berbasis Teknologi Tepat Guna”**.

Dengan acuan dasar visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2018-2023, maka Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk menetapkan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

b. Tujuan dan Sasaran

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Nganjuk maka Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis;
- 2) Terwujudnya kelembagaan koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing.

Guna mewujudkan tujuan organisasi perangkat daerah tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mempunyai sasaran pembangunan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya penyerapan angkatan kerja didalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja;
- 2) Meningkatnya volume usaha koperasi; dan
- 3) Meningkatnya omzet volume usaha mikro.

Tabel Matrik Ukuran dan Target Kinerja
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian (%) 2018	Target Tahunan (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,91	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00
		Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	100,00	100,00	100,00	80,00	85,00	90,00
2.	Terwujudnya kelembagaan koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing	Meningkatnya jumlah koperasi kategori sehat	Persentase Koperasi Sehat	68,15	34,00	36,00	37,00	38,00	39,00
		Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki Ijin Usaha	Persentase Pertumbuhan Legalitas Usaha Mikro	29,79	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 - 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian (%) 2018	Target Tahunan (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,64%	2,30%	4,80%	4,64%	4,44%	4,24%
2.	Terwujudnya kelembagaan koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	4,06%	4,75%	5,25%	5,50%	5,75%	6,25%
		Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	4,96%	5,20%	5,70%	6,00%	6,50%	7,00%

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 (lima) tahun menyesuaikan dokumen renstra OPD serta RPJMD Pemerintah Kabupaten Nganjuk. IKU

tersebut pada akhirnya dijadikan sebagai suatu acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.

2.3. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari tujuan dan sasaran tersebut kemudian dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dan diperjanjikan dalam suatu bentuk Perjanjian Kinerja pada tiap jabatan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Renstra Tahun 2018 – 2023 sebanyak 2 (dua) tujuan dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis	1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,64%
2.	Terwujudnya kelembagaan koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing	1. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi 2. Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro	5,50 % 6,00%

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 sebanyak 4 (empat) sasaran dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,00 %
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	80,00%
3.	Meningkatnya jumlah koperasi kategori sehat	Persentase Koperasi Sehat	37,00 %
4.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas produk usaha	Persentase Pertumbuhan Legalitas Produk Usaha Mikro	29,00%

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk menjalankan program sesuai dengan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangannya sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Tenaga Kerja
 - a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro
 - a) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - b) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - c) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - d) Progra Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro (UKM)
 - e) Program Pengembangan UMKM
3. Urusan Pilihan Transmigrasi
 - a) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

2.4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Keseluruhan sasaran strategis dengan indikator capaian kinerja dijabarkan lebih lanjut kedalam program dan kegiatan yang masing – masing mempunyai maksud, tujuan dan karakteristik tertentu sesuai dengan sasaran strategis yang ingin dicapai. Untuk itu, indikator kinerja harus diwujudkan dalam bentuk komitmen kesanggupan guna mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya dalam kerangka Penetapan Kinerja.

Penetapan kinerja merupakan pernyataan / kesepakatan / perjanjian diantara pimpinan dengan staf untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasar pada tugas pokok, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun indikator kinerja utama yang ditetapkan pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis	1. Persentase Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)	4,64 %
2.	Terwujudnya kelembagaan koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing	1. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi 2. Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro	5,50 % 6,00 %

Sedangkan sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,00 %
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	80,00%
3.	Meningkatnya jumlah koperasi kategori sehat	Persentase Koperasi Sehat	37,00%
4.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas produk usaha	Persentase Pertumbuhan legalitas produk Usaha Mikro	29,00%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada dasarnya akuntabilitas kinerja adalah perwujudan suatu kewajiban penyelenggaraan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dan dalam mencapai tujuan serta sasaran periode yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non keuangan (*performance indicators*) atau tingkat capaian program sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran standar pencapaian sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
91 ≥	Sangat Tinggi
76 ≤ 90	Tinggi
66 ≤ 75	Sedang
51 ≤ 65	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

3.1.1. Urusan Per Sasaran

3.1.1.1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Pencapaian kinerja terkait dengan tujuan dan sasaran OPD pada tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1.1.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2021

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
		Target	Realisasi	Capaian %
1. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,64%	4,98%	93,21%

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	KINERJA		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,00%	61,04%	87,20%
2	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	80,00%	50,00%	62,50%

Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka di angka 4,96% dari target yang ditentukan sebesar 4,64% dengan capaian kinerja sebesar 93,21%. Persentase TPT ini diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk yang mengangur sebanyak 26.982 orang terhadap jumlah angkatan kerja sejumlah 542.035 orang.

Sedangkan untuk persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 sebesar 61,04% dari target yang ditentukan sebesar 70,00% dengan capaian kinerja 87,20%. Persentase TPAK ini diperoleh dari jumlah penduduk usia bekerja sebanyak 843.786 orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja sejumlah 515.053 orang.

Kemudian untuk capaian indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan pada tahun 2021 sebesar 50% yang diperoleh dari jumlah kasus perselisihan yang masuk sebanyak 2 (dua) kasus dan 1 (satu) diantaranya dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Tabel 3.1.1.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
			Target 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1.	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,64%	4,80%	4,96%

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	KINERJA		
			Target 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,00%	69,00%	61,04%
2	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	80,00%	100%	50,00%

Pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,80 % sedangkan di tahun 2021 rasionya sebesar 4,64 %. Bila dibandingkan pencapaian dari tahun ke tahun terdapat kenaikan persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 93,21%.

Sedangkan untuk persentase Tingkat Partisiapasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 sebesar 69,00% dan di tahun 2021 sebesar 70,00% sehingga ada KENAIKAN persentase tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 98,57%.

Kemudian untuk capaian indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan pada tahun 2020 sebesar 100% dan di tahun 2021 sebesar 80,00% sehingga ada penurunan persentase keberhasilan sebesar 20%.

Tabel 3.1.1.1.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode RENSTRA

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
			Target 2023	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1.	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,24,%	4.98%	117,45%

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	KINERJA		
			Target 2023	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,00%	61,04%	84,77%
2	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	90,00%	50,00%	55,55%

Pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,64 % sedangkan pada akhir periode renstra ditetapkan target sebesar 4,22%, sehingga tingkat kemajuan pencapaian target akhir periode Renstra sebesar 117,45%.

Sedangkan untuk persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 sebesar 61,04% dan di akhir periode Renstra ditetapkan target sebesar 72% sehingga sampai dengan saat ini tingkat kemajuannya mencapai 84,77%.

Kemudian untuk capaian indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan pada tahun 2021 sebesar 80,00% dan di akhir periode Renstra ditetapkan target sebesar 100% sehingga sampai dengan saat ini tingkat kemajuannya mencapai 55,55%.

Tabel 3.1.1.1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			
			Realisasi 2021	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1.	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,98%	3,92%	5,34%	

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	KINERJA			
			Realisasi 2021	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	87,20	96,08%	94,66%	
2	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	100%	-	-	

Pada tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nganjuk sebesar 4,64% sedangkan di Propinsi Jawa Timur sebesar 5,74% dan di tingkat nasional sebesar 6,49%. Dilihat dari persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Nganjuk lebih kecil dibandingkan dengan capaian Propinsi Jawa Timur maupun secara nasional.

Untuk persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 sebesar 87,20% dan di Propinsi Jawa Timur sebesar 70,33% sedangkan secara nasional persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 64,24%. Dilihat dari persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Nganjuk lebih besar dibandingkan dengan capaian Propinsi Jawa Timur maupun secara nasional meski secara target daerah kurang dapat tercapai.

Kemudian untuk capaian indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan pada tahun 2021 sebesar 80,00% namun belum ada data pembandingan terkait indikator kinerja tersebut baik di tingkat Propinsi Jawa Timur maupun secara nasional.

Tabel 3.1.1.1.5

Alokasi Per Tujuan / Sasaran Strategis

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	Anggaran (Rp)	%
1.	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1.330.202.800	96,17%

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		
1.	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan	155.195.000	97,46%

Jumlah Anggaran

Anggaran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 sebesar Rp. 7.884.079.901,- dengan alokasi urusan wajib tenaga kerja sebesar Rp. 6.894.863.401,- yang mana anggaran tersebut dipergunakan untuk mencapai indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan indikator sasaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar Rp. 1.279.308.400,- dari total anggaran sebesar Rp. 1.330.202.800,- dengan persentase sebesar 96,17%.
2. Alokasi anggaran terkait dengan pencapaian indikator sasaran persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan sebesar Rp. 151.248.500,- dari total anggaran sebesar Rp. 155.195.000,- dengan persentase sebesar 97,46 %.

Tabel 3.1.1.1.6

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,24	4,98	93,21	100	96,17	100

SASARAN		INDIKATOR SASARAN						
1.	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70	61,04	87,20			
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan	80	50,00	62,50	100	97,46	100

Adapun terkait dengan rasio capaian kinerja terhadap anggaran yang terserap dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 93,21% serta capaian kinerja indikator sasaran persentase tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 87,20% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 96,17%.
2. Capaian kinerja terhadap indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan pada tahun 2021 sebesar 50% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 97,46%.

Tabel 3.1.1.1.7

Efisiensi Penggunaan Sumber dana

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	93,21%	96,17%	103,17%

SASARAN		INDIKATOR SASARAN			
1.	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	87,20%	96,17%	110,29%
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan	50,00%	97,46%	96,17%

Terkait dengan efisiensi penggunaan sumber dana tahun 2021 sebagaimana tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 93,21% serta capaian kinerja indikator sasaran persentase tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 87,20% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 96,17%, sehingga untuk capaian kinerja persentase TPT tingkat efisiensinya sebesar 103,17% sedangkan untuk capaian kinerja persentase tingkat partisipasi angkatan kerja tingkat efisiensinya sebesar 110,29%.
2. Capaian kinerja terhadap indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilanpada tahun 2021 sebesar 50 % dengan capaian realisasi anggaran sebesar 97,46% sehingga tingkat efisiensinya mencapai 96,17%.

3.1.1.2. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro

Pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dapat dilihat dari indikator kinerja utama serta indikator sasaran sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel: 3.1.1.2.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2021

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		KINERJA		
				Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya kelembagaan koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing		1.	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	5,50%	-8,99%	-163,48%
		2.	Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro	6,00%	5,00%	83,33%
SASARAN		INDIKATOR SASARAN				
1.	Meningkatnya jumlah koperasi kategori sehat	1.	Persentase Koperasi Sehat	37,00%	24,24%	65,51%
2.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas produk Usaha	2.	Persentase Pertumbuhan legalitas produk Usaha Mikro	29,00%	32,12%	110,77%

Pencapaian indikator kinerja terkait dengan tujuan terwujudnya kelembagaan koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. *Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi*

Sesuai dengan data keragaan koperasi pada tahun 2020 total volume usaha koperasi sebesar Rp. 309.546.944,- sedangkan pada tahun 2021 tercatat volume usaha koperasi sebesar Rp. 309.546.944,- sehingga terdapat pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar -8,99% dari target 5,50% yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya sebesar -163,48%.

2. *Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro*

Omzet dari pelaku usaha mikro yang tercatat pada tahun 2021 sebesar Rp. 139.779.216,- sedangkan di tahun 2020 tercatat omzet sejumlah Rp. 133.123.063,- sehingga terdapat pertumbuhan omzet sebesar 4,72% dari 5,00% target pertumbuhan yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya sebesar 83,33%.

Pencapaian kinerja terkait dengan sasaran meningkatnya jumlah koperasi kategori sehat dan meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin usaha kami uraikan sebagai berikut :

1. *Persentase Koperasi Sehat*

Koperasi sehat merupakan koperasi yang mempunyai cukup modal, kualitas aktiva produktif, manajemen yang mumpuni, asset yang cukup serta pertumbuhan volume usaha yang baik. Pada tahun 2021 jumlah koperasi sehat sejumlah 215 unit dari 887 unit koperasi yang tercatat dengan rasio 24,24% dari 37,00% yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya sebesar 65,51%.

2. *Persentase Pertumbuhan Legalitas Produk Usaha Mikro*

Pada tahun 2021 jumlah pelaku usaha mikro yang telah memiliki ijin usaha sebesar 25.674 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 19.433 orang sehingga terdapat pertumbuhan sebesar 32,12% dari 29,00% pertumbuhan yang ditetapkan. Dari data tersebut maka capaian kinerjanya jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 110,77%. Hal ini tidak terlepas dari mulai operasionalnya Mall Pelayanan Publik (MPP) Nyawiji serta aplikasi pengajuan ijin usaha melalui OSS (*Online Single Submission*) yang membuat pelaku usaha sangat antusias untuk melegalkan jenis usaha yang digeluti.

Tabel 3.1.1.2.2

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		KINERJA		
				Target 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	5,50%	-8,99%	-8,99%
		2	Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro	6,00%	4,72%	5,00%
SASARAN		INDIKATOR SASARAN				
1.	Meningkatnya jumlah koperasi kategori sehat	1.	Persentase Koperasi Sehat	37%	35,70%	24,24%
2.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki Ijin Usaha	2.	Persentase Pertumbuhan Legalitas Produk Usaha Mikro	29%	11,83%	32,12%

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja utama persentase pertumbuhan volume usaha koperasi dan persentase pertumbuhan omzet usaha mikro tahun 2020 terhadap realisasi kinerja tahun 2021 sebagaimana tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi di tahun 2020 sebesar -8,99%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar -8,99% dari 5,50% target yang ditetapkan. Dan apabila dihitung capaian dari tahun ke tahun ada kenaikan volume usaha koperasi sebesar -163,48%.
2. Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro pada tahun 2020 sebesar 4,72% dan di tahun 2021 sebesar 5,00% dari 6,00% target yang ditetapkan. Capaian dari tahun ke tahun terhadap indikator ini ada kenaikan sebesar 83,33%.

Tabel 3.1.1.2.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		KINERJA		
				Target 2023	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	6,25%	-8,99%	-143,84%
		2	Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro	7,00%	5%	71,43%
SASARAN		INDIKATOR SASARAN				
1.	Meningkatnya jumlah koperasi kategori sehat	1.	Persentase Koperasi Sehat	39,00%	24,24%	62,15%
2.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki Ijin Usaha	2.	Persentase Pertumbuhan Legalitas Usaha Mikro	31%	32,12%	103,61%

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja utama persentase pertumbuhan volume usaha koperasi dan persentase pertumbuhan omzet usaha mikro tahun 2021 sampai dengan akhir periode renstra sebagaimana tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi pada tahun 2021 sebesar -8,99% sedangkan target pada masa akhir periode Renstra adalah 6,25 % sehingga tingkat target tidak tercapai berada pada angka -143,84%.
2. Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro pada tahun 2021 sebesar 5,00% sedangkan target pada masa akhir periode Renstra adalah 7 %, sehingga tingkat kemajuan yang sudah tercapai adalah 71,43 %.

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja sasaran tahun 2021 sampai dengan akhir periode renstra sebagaimana tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Persentase koperasi sehat pada tahun 2021 sebesar 24,24 % sedangkan target pada masa akhir periode Renstra adalah 39,00% sehingga tingkat kemajuan yang sudah tercapai berada pada angka 62,15%.
2. Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro yang memiliki ijin usaha pada tahun 2021 sejumlah 32,12% sedangkan target pada masa akhir periode Renstra adalah 31% sehingga tingkat kemandirian yang sudah tercapai berada pada angka 103,61%

Tabel 3.1.1.2.4
Alokasi Per Sasaran Strategis

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Anggaran	%
1.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	269.470.000	99,01
		2	Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro	131.663.300	96,68
SASARAN		INDIKATOR SASARAN			
1.	Meningkatnya jumlah koperasi kategori sehat	1.	Persentase Koperasi Sehat	80.135.000	91,76
2.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki Ijin Usaha	2.	Persentase Pertumbuhan Legalitas Usaha Mikro	21.535.950	78,92

Jumlah anggaran Disnakerkop dan UM Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.884.079.901,- dengan alokasi anggaran untuk urusan wajib koperasi dan usaha mikro sebesar Rp. 864.819.500,- dengan uraian sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran terkait dengan indikator kinerja utama persentase pertumbuhan volume usaha koperasi dan indikator sasaran persentase koperasi sehat sebesar Rp. 269.470.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 7.884.079.901,- dengan persentase alokasi sebesar 3,00%.
2. Alokasi anggaran terkait dengan indikator kinerja utama persentase pertumbuhan omzet usaha mikro dan indikator sasaran persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro yang memiliki ijin usahasebesar Rp. 131.663.300,- dari total anggaran sebesar Rp. 7.884.079.901,- dengan persentase alokasi sebesar 2,00%.

Tabel 3.1.1.2.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	5,50%	-8,99%	- 163,48%	100%	99,01%	99,01%
		2	Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro	6,00%	0,21%	5,25%	100%	96,68%	96,68%
SASARAN		INDIKATOR SASARAN							
1.	Meningkatnya jumlah koperasi kategori sehat	1.	Persentase Koperasi Sehat	37,00%	70,68%	104,17%	100%	91,76%	91,76%
2.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki Ijin Usaha	2.	Persentase Pertumbuhan Legalitas Usaha Mikro	29,00%	30,79%	102,62%	100%	78,92%	78,92%

Adapun terkait dengan rasio capaian indikator kinerja utama persentase pertumbuhan volume usaha koperasi dan indikator sasaran persentase koperasi sehat terhadap anggaran yang terserap dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Capaian terhadap indikator kinerja utama persentase pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar -163,48 % dan indikator sasaran persentase koperasi sehat sebesar 103,29% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,01 %.
2. Capaian terhadap indikator kinerja utama persentase pertumbuhan omzet usaha mikro sebesar 5,25% dan indikator sasaran persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro yang memiliki ijin usaha sebesar 102,62% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 78,92 %.

Tabel 3.1.1.2.7
Efisiensi Penggunaan Sumber dana

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	-163,48%	99,01%	-60,56%
		2	Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro	5,25%	96,68%	184,00%
SASARAN		INDIKATOR SASARAN				
1.	Meningkatnya jumlah koperasi kategori sehat	1.	Persentase Koperasi Sehat	104,17%	91,76%	88,08%
2.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki Ijin Usaha	2.	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang Memiliki Ijin Usaha	102,62%	78,92%	76,90%

Terkait dengan efisiensi penggunaan sumber dana tahun 2021 sebagaimana tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama persentase pertumbuhan volume usaha koperasi mencapai kinerja sebesar -163,48% dengan anggaran terserap sebesar 99,01% sehingga tingkat efisiensinya -60,56%. Sedangkan indikator sasaran persentase koperasi sehat mencapai kinerja 104,17 dengan anggaran terserap sebesar 91,76% sehingga tingkat efisiensinya 88,08%.
2. Indikator kinerja utama persentase pertumbuhan omzet usaha mikro mencapai kinerja sebesar 5,25% dengan serapan anggaran sebesar 96,68% sehingga tingkat efisiensinya 184,00%. Sedangkan persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro yang memiliki ijin usaha sebesar 102,62% dengan anggaran terserap sebesar 78,92% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 76,90 %.

3.1.1.3. Urusan Pilihan Transmigrasi

Urusan pilihan transmigrasi merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dan meskipun bukan merupakan tujuan dan sasaran OPD indikator kinerja pada urusan ini mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD secara tidak langsung sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel: 3.1.1.3.1

Pencapaian Kinerja Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA		
		Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	Persentase Calon Transmigran yang Diberangkatkan	60,00%	0%	0%

Pada tahun 2021 calon transmigran tidak ada yang diberangkatkan karena adanya pandemi covid-19.

Tabel 3.1.1.3.2
Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA		
		Target 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Meningkatnya jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	Persentase Calon Transmigran yang Diberangkatkan	50,00%	0%	0%

Capaian kinerja persentase calon transmigran yang diberangkatkan pada tahun 2020 sebesar 0 % sedangkan pada tahun 2021 capaian kinerja calon transmigran yang diberangkatkan sebesar 0% karena adanya pandemi covid-19.

Tabel 3.1.1.3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA		
		Target 2023	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	Persentase Calon Transmigran yang Diberangkatkan	80%	0%	0%

Capaian kinerja persentase calon transmigran yang diberangkatkan pada tahun 2021 sebesar 0% karena adanya pandemi covid-19 sedangkan target indikator tersebut pada masa akhir periode Renstra sebesar 80%..

Tabel 3.1.1.3.4
Alokasi Per Sasaran Strategis

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Anggaran	%
Meningkatnya jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	Persentase Calon Transmigran yang Diberangkatkan	126.100.000,-	98,65%

Jumlah anggaran Disnakerkop dan UM Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.884.079.901,- dengan alokasi anggaran untuk urusan pilihan transmigrasi sebesar Rp. 126.100.000,- sehingga alokasi anggarannya mencapai 98,65%.

Tabel 3.1.1.3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	Persentase Calon Transmigran yang Diberangkatkan	60%	0%	0%	100%	98,65%	98,65%

Capaian kinerja terhadap indikator persentase calon transmigran yang diberangkatkan pada tahun 2021 sebesar 0% dengan realisasi anggaran sebesar 98,65 %.

Tabel 3.1.1.3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber dana

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	Persentase Calon Transmigran yang Diberangkatkan	0%	98,65%	98,18%

Indikator persentase calon transmigran yang diberangkatkan mencapai kinerja sebesar 0% dengan anggaran terserap sebesar 98,65% sehingga tingkat efisiensinya mencapai 98,65%.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sesuai dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 terdapat 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Berikut capaian indikator kinerja utama dan capaian kinerja indikator sasaran yang telah tercapai di tahun anggaran 2021 :

A. *Capaian Indikator Kinerja Utama*

Capaian indikator kinerja utama merupakan tolak ukur dari pelaksanaan tujuan OPD yang mana dalam hal ini adalah terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis dengan indikator kinerja utama persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tujuan kedua adalah terwujudnya kelembagaan koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing dengan 2 (dua) indikator yaitu persentase

pertumbuhan volume usaha koperasi serta persentase pertumbuhan omzet pelaku usaha mikro. Berikut capaian indikator kinerja utama pada tahun anggaran 2020 :

1) Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka di angka 4,98% dari target yang ditentukan sebesar 4,64% dengan capaian kinerja sebesar 93,21%. Persentase TPT ini diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk yang mengangur sebanyak 26.982 orang terhadap jumlah angkatan kerja sejumlah 542.035 orang.

Capaian positif indikator kinerja utama persentase tingkat pengangguran terbuka ini didorong oleh beberapa faktor, diantaranya :

- a) Masuknya investasi penanaman modal dalam skala yang cukup besar di Kabupaten Nganjuk sebagai dampak tingginya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten/Kota kawasan industri padat karya sehingga memaksa industri padat karya untuk merelokasi basis produksi perusahaan ke daerah yang nilai UMK nya masih relatif rendah;
- b) Relokasi perusahaan khususnya industri padat karya secara langsung meningkatkan kesempatan dan penyerapan tenaga kerja formal untuk mengisi posisi di unit produksi skala padat karya;
- c) Penyerapan jumlah tenaga kerja pada sektor usaha padat karya di Kabupaten Nganjuk menyebabkan *multiplier effect* yang signifikan terhadap perekonomian daerah sehingga muncul sumber ekonomi baru berupa tumbuhnya wira usaha baru yang secara langsung meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor informal.

2) Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Sesuai dengan data keragaan koperasi pada tahun 2021 total volume usaha koperasi sebesar Rp. 309.546.944,- sedangkan pada tahun 2020 309.546.944 tercatat volume usaha koperasi sebesar Rp. 340.130.339,- sehingga terdapat pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar -8,99% dari target 5,50% yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya mencapai 163,48%.

Capaian terhadap indikator kinerja utama ini sangat baik dan didorong oleh beberapa faktor pendukung, yaitu :

- a) Masyarakat masih mempunyai minat menggunakan layanan koperasi ;
- b) Dalam hal pinjaman dana, bunga dari koperasi bisa bersaing dengan layanan perbankan namun dengan proses yang tidak rumit dan bahkan setiap tahun anggota mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha);
- c) Semakin banyaknya koperasi yang melakukan ekstensifikasi usaha diberbagai bidang yang menguntungkan dan tidak hanya tergantung pada simpan pinjam.

3) **Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro**

Omzet dari pelaku usaha mikro yang tercatat pada tahun 2021 sebesar Rp. 139.779.216,- sedangkan di tahun 2020 tercatat omzet sejumlah Rp. 133.123.063,- sehingga terdapat pertumbuhan omzet sebesar 5,00% dari 6,00% target pertumbuhan yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya sebesar 83,33%.

Sama halnya dengan pertumbuhan volume usaha koperasi, capaian terhadap indikator kinerja utama persentase pertumbuhan omzet usaha mikro ini sangat baik. Ada beberapa faktor pendukung terhadap capaian ini diantaranya :

- a) Semakin masifnya pemasaran on line dengan platform media sosial dalam menjual produk barang/jasa berdampak pada meningkatnya omzet penjualan;
- b) Tumbuhnya pelaku usaha mikro baru sebagai dampak multiplier effect berdirinya pabrik – pabrik di Kabupaten Nganjuk yang mana secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berujung pula pada meningkatnya daya beli masyarakat.

B. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Capaian indikator kinerja sasaran merupakan tolak ukur dari pelaksanaan sasaran OPD yang mana dalam hal ini terdapat 4 (empat) sasaran. Berikut capaian indikator kinerja sasaran pada tahun anggaran 2021 :

1) **Persentase Tingkat Partisipatif Angkatan Kerja (TPAK)**

Persentase Tingkat Partisipatif Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 sebesar 61,04% dari target yang ditentukan sebesar 70,00% dengan capaian kinerja 87,20%. Persentase TPAK ini diperoleh dari jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 542.035 orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja sejumlah 26.982 orang.

Untuk persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 sebesar 87,20% dan di Propinsi Jawa Timur sebesar 96,08% sedangkan secara nasional persentase TPAK sebesar 94,66%. Dilihat dari persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Nganjuk lebih besar dibandingkan dengan capaian Propinsi Jawa Timur maupun secara nasional.

Capaian positif indikator kinerja utama persentase tingkat pengangguran terbuka ini didorong oleh beberapa faktor, diantaranya :

- 1) Masuknya investasi penanaman modal dalam skala yang cukup besar di Kabupaten Nganjuk sebagai dampak tingginya UMK sehingga memaksa industri padat karya untuk merelokasi basis produksi perusahaan ke daerah yang nilai UMK nya masih relatif rendah;
- 2) Relokasi perusahaan khususnya industri padat karya secara langsung meningkatkan kesempatan dan penyerapan tenaga kerja ;

- 3) Penyerapan jumlah tenaga kerja pada sektor usaha padat karya di Kabupaten Nganjuk menyebabkan *multiplier effect* yang signifikan terhadap perekonomian daerah sehingga muncul sumber ekonomi baru berupa tumbuhnya wira usaha baru yang secara langsung meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor informal.

2) **Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan**

Capaian indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan pada tahun 2021 sebesar 50% yang diperoleh dari jumlah kasus perselisihan yang masuk sebanyak 2 (dua) kasus dan 1 (satu) diantaranya dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Capaian ini termasuk cukup baik dan tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong diantaranya :

- a) Semakin pahamnya para pihak dalam hal ini pekerja dan pengusaha dalam menyikapi suatu permasalahan dengan bijak dengan mempertimbangkan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku ;
- b) Penyelesaian perselisihan kasus hubungan industrial di luar pengadilan menjadi alternatif terbaik bagi para pihak yang berselisih karena proses di pengadilan memakan waktu, biaya dan proses yang rumit sehingga seringkali merugikan salah satu pihak.

3) **Persentase Koperasi Sehat**

Koperasi sehat merupakan koperasi yang mempunyai cukup modal, kualitas aktiva produktif, manajemen yang mumpuni, asset yang cukup serta pertumbuhan volume usaha yang baik. Pada tahun 2021 jumlah koperasi sehat sejumlah 215 unit dari 897 unit koperasi yang tercatat dengan rasio 36% dari 44,70% yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya sebesar 104,1%.

Persentase koperasi sehat pada tahun 2020 sebesar 44,70% sedangkan target pada masa akhir periode Renstra adalah 42 % sehingga tingkat kemajuan yang sudah tercapai berada pada angka 104,1 %.

Capaian ini termasuk tinggi dan tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong diantaranya :

- a) Semakin pahamnya para pihak dalam hal ini pekerja dan pengusaha dalam menyikapi suatu permasalahan dengan bijak dengan mempertimbangkan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku ;
- b) Penyelesaian perselisihan kasus hubungan industrial di luar pengadilan menjadi alternatif terbaik bagi para pihak yang berselisih karena proses di

peradilan memakan waktu, biaya dan proses yang rumit sehingga seringkali merugikan salah satu pihak dan tidak ada *win – win solution*.

4) Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang Memiliki Ijin Usaha

Pada tahun 2020 jumlah pelaku usaha mikro yang telah memiliki ijin usaha sebesar 7.206 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5.675 orang sehingga terdapat pertumbuhan sebesar 26,98% dari 2,90% pertumbuhan yang ditetapkan. Dari data tersebut maka capaian kinerjanya jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 930,27%.

Capaian ini termasuk tinggi dan tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong diantaranya:

- a) Mulai operasionalnya Mall Pelayanan Publik (MPP) Nyawiji serta aplikasi pengajuan ijin usaha melalui OSS (*Online Single Submission*) yang membuat pelaku usaha mikro sangat antusias untuk melegalkan jenis usaha yang digeluti.
- b) Tumbuhnya pelaku usaha mikro / wira usaha baru sebagai dampak *multiplier effect* dari tumbuhnya industri padat karya di Kabupaten Nganjuk.

3.3 REALISASI KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dana yang telah dialokasikan serta target pendapatan yang telah dibebankan pada masing-masing satuan kerja.

Rincian alokasi dan realisasi dana untuk tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3.1
Realisasi Anggaran Tujuan / Sasaran

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	882.552.500	662.533.200	75,07%
SASARAN		INDIKATOR SASARAN			
1.	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			

2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan	210.000.000	166.402.840	79,24%
----	--	--	-------------	-------------	--------

Anggaran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.267.014.028,- dengan alokasi urusan wajib tenaga kerja sebesar Rp. 2.655.000.000,- yang mana anggaran tersebut dipergunakan untuk mencapai indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan indikator sasaran tingkat kesempatan kerja (TKK) sebesar Rp. 882.552.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 662.533.200,- sehingga persentasenya sebesar 75,07 %.
2. Alokasi anggaran terkait dengan pencapaian indikator sasaran persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan sebesar Rp. 210.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 166.402.840,- sehingga persentasenya sebesar 79,24%.

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	1.107.712.800	928.073.701	83,78%
		2	Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro	546.084.900	501.422.650	91,82%
SASARAN		INDIKATOR SASARAN				
1.	Meningkatnya jumlah koperasi kategori sehat	1.	Persentase Koperasi Sehat	416.497.000	414.598.198	99,54%
2.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki Ijin Usaha	2.	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang Memiliki Ijin Usaha			

Jumlah anggaran Disnakerkop dan UM Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 8.267.014.028,- dengan alokasi anggaran untuk urusan wajib koperasi dan usaha mikro sebesar Rp. 2.070.294.700,- dengan uraian sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran terkait dengan indikator kinerja utama persentase pertumbuhan volume usaha koperasi dan indikator sasaran persentase koperasi sehat sebesar Rp.

1.653.797.700,- dari serapan anggaran sebesar Rp. 1.429.496.351,- dengan persentase serapan sebesar 86,43 %.

2. Alokasi anggaran terkait dengan indikator kinerja utama persentase pertumbuhan omzet usaha mikro dan indikator sasaran persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro yang memiliki ijin usaha sebesar Rp. 416.497.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 414.598.198,- dengan persentase serapan sebesar 99,54 %.

Sedangkan untuk mengukur capaian kinerja kita perlu melihat dan membandingkan Persentase capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang terserap. Hal ini untuk menjaga agar perbandingan anggaran yang dibelanjakan sesuai dengan capaian kinerja instansi. Gambaran capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.3.2

Capaian Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaran

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,2	4,80	47,87	100	75,52	99,75
SASARAN	INDIKATOR SASARAN						
1. Meningkatkan penyerapan angkatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	69	65,95	99,29			
2. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan	100	75,24	75,24	100	79,24	79,24

Adapun terkait dengan rasio capaian kinerja terhadap anggaran yang terserap dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 71,36% serta capaian kinerja indikator sasaran persentase tingkat kesempatan kerja sebesar 99,06% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98,59 %.
2. Capaian kinerja terhadap indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan pada tahun 2019 sebesar 75,24 % dengan capaian realisasi anggaran sebesar 79,24 %.

Tabel. 3.3.2

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	5,25%	4,37%	92,09%	100%	83,78 %	83,78 %
		2	Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro	5,70%	0,12%	5,25%	100%	91,82 %	91,82 %
SASARAN		INDIKATOR SASARAN							
1.	Meningkatnya jumlah koperasi kategori sehat	1.	Persentase Koperasi Sehat	36%	70,68 %	104,17 %	100%	9,13%	69,52 %
2.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki Ijin Usaha	2.	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang Memiliki Ijin Usaha	28%	30,79 %	102,62 %	100%	83,78 %	83,78 %

Adapun terkait dengan rasio capaian indikator kinerja utama persentase pertumbuhan volume usaha koperasi dan indikator sasaran persentase koperasi sehat terhadap anggaran yang terserap dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Capaian terhadap indikator kinerja utama persentase pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 4,37 % dan indikator sasaran persentase koperasi sehat sebesar 103,29% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 83,78 %.
2. Capaian terhadap indikator kinerja utama persentase pertumbuhan omzet usaha mikro sebesar 114,15% dan indikator sasaran persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro yang memiliki ijin usaha sebesar 930,27% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 91,82 %.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai hasil dari pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas umum pemerintahan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya sebagai laporan / *progress report* perjalanan pembangunan selama tahun anggaran 2021, sehingga masyarakat dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan. Di masa mendatang Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Guna menyempurnakan dan memperbaiki pelaporan pencapaian kinerja ini, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk sangat mengharapkan adanya peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk:

- 1) Partisipasi pihak-pihak pemegang kepentingan/*stakeholders*, antara lain Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Bagian, Lembaga Teknis, dan perangkat daerah lainnya), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan bidang Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah.
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun Pemerintah Propinsi dan Pusat serta penyelarasan dengan Program Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan paradigma aparat pemerintah kabupaten untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang

berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.

4.2. Permasalahan

Pencapaian kinerja dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 secara rerata pada umumnya berjalan cukup efisien dilihat dari perbandingan persentase capaian kinerja dengan persentase capaian realisasi anggaran. Secara umum permasalahan yang terjadi pada tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 - a) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dari pencari kerja di Kabupaten Nganjuk guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja khususnya pemenuhan lowongan kerja pada perusahaan – perusahaan yang baru berdiri sehingga angka pengangguran masih cukup tinggi.
 - b) Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja sehingga menyebabkan tingkat *turn over* (keluar masuk pekerja) pada perusahaan masih cukup tinggi.
2. Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi dan Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro
 - a) Masih kurangnya pengetahuan administrasi maupun kelembagaan koperasi bagi pengurus / pengelola koperasi baik unit simpan pinjam maupun usaha riil serta kurangnya kualitas sumber daya manusia baik dari jajaran pengurus maupun pengelola.
 - b) Masih rendahnya produktifitas dibidang manajemen, penguasaan teknologi dan pemasaran serta rendahnya kompetensi kewirausahaan usaha mikro.

4.3. Rekomendasi

Adapun terkait dengan rekomendasi atas penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Rekomendasi terkait pencapaian indikator kinerja utama persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 - a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas program / kegiatan yang mempunyai keluaran memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan produktifitas dan kualitas pekerja guna menekan angka *turn over* dalam hubungan kerja
3. Rekomendasi terkait pencapaian indikator kinerja utama persentase pertumbuhan volume usaha koperasi dan pertumbuhan omzet usaha mikro
 - a) Perlunya pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengelola tentang administrasi keuangan maupun terkait kelembagaan koperasi serta untuk meningkatkan

kompetensi sumber daya manusia termasuk dari sisi *attitude, knowledge, experience, responsibilities* dan *accountability*.

- b) Perlunya pemberdayaan usaha mikro melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usaha mikro diantaranya pendidikan dan pelatihan dibidang manajemen, penguasaan teknologi informasi dalam pemasaran on line serta peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro melalui pelatihan berbasis kompetensi produk.

Nganjuk, Pebruari 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Nganjuk

Drs. SUPIYANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631015 198903 1 016

kompetensi sumber daya manusia termasuk dari sisi *attitude, knowledge, experience, responsibilities* dan *accountability*.

- b) Perlunya pemberdayaan usaha mikro melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usaha mikro diantaranya pendidikan dan pelatihan dibidang manajemen, penguasaan teknologi informasi dalam pemasaran on line serta peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro melalui pelatihan berbasis kompetensi produk.

Nganjuk, Pebruari 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Nganjuk

